

Tangani Banjir Demak, Jokowi Minta Awan Digeser ke Arah Laut

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, pemerintah melakukan Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) untuk menangani banjir yang melanda Kabupaten Demak, Jawa Tengah.

Jokowi mengatakan TMC dilakukan untuk menggeser awan yang ada di atas langit Demak agar digeser ke arah laut. Sehingga, hujan tidak akan jatuh di wilayah Demak. Dengan begitu, penanganan banjir Demak bisa dilakukan secara maksimal.

"Kita harapkan, awan di atas juga telah dilakukan TMC sehingga bisa digeser ke arah laut ini juga akan sangat mengurangi hujan yang ada di Kabupaten Demak dan sekitarnya," ujar Jokowi usai meninjau pengungsian, di Demak, Jawa Tengah, Jumat (22/3).

Kepala Negara telah mendapatkan laporan bahwa ketinggian banjir sudah surut dari awalnya 2 meter, kini tinggal 50 centimeter saja. Meski begitu, dia meminta penanganan khususnya pemompaan air terus dilakukan karena genangan masih mengganggu aktivitas masyarakat.

"Juga yang berkaitan dengan yang sudah ini sudah turun dari 2 meter. Tadi mendapatkan laporan hampir semuanya sudah setengah meter, 50 cm, tapi apapun itu tetap mengganggu aktivitas warga sehingga yang ketiga nanti akan lakukan pemompaan," ujar Jokowi.

Hujan yang sangat ekstrem menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir di Demak. Sehingga, menyebabkan tanggul jebol akibat tidak mampu menampung debit air.

"Ya ini memang hujannya sangat ekstrem, karena hujan ekstrem itu 150 milimeter, yang di sini sudah 238 milimeter. Sangat ekstrem sekali. Sehingga tanggul yang ada tidak muat dan menggerus dan jebol tanggulnya," kata Jokowi.

Meski begitu, Jokowi mengatakan bahwa sejumlah tanggul jebol telah berhasil ditutup. "Tapi tadi malam yang lebar itu, yang jebol 15 meter tadi malam jam 1 sudah tertutup, selesai dikerjakan selama 4 hari berturut-turut, siang malam," ujarnya. ● han

PDI-P Pemenang Pemilu 2024, Otomatis Dapat Kursi Ketua DPR Lagi?

JAKARTA (IM) - Perolehan jumlah suara PDI-P tertinggi pada Pemilu 2024. Dengan demikian, di atas kertas, partai bintang moncong putih ini berhak menduduki kursi Ketua DPR, melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan 2019-2024 yang saat ini ada di jabat putri Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani.

Perolehan suara sah hasil rekapitulasi nasional KPU RI, PDI-P meraup 110 (18,97 persen) kursi dari 84 daerah pemilihan (dapil) DPR RI.

Berdasarkan Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), kursi Ketua DPR RI ditentukan berdasarkan perolehan kursi terbanyak partai politik di parlemen. Hal itu termuat dalam Pasal 427 D ayat (1) huruf b UU MD3 yang berbunyi "Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR."

PDI-P membukukan 25.387.239 suara sah pada Pileg DPR RI 2024. Mereka berhasil meraup suara dan kursi lebih banyak ketimbang Partai Golkar, yang berada di

posisi kedua yang diprediksi mendapatkan 102 (17,59 persen) kursi setelah meraup 23.208.654 suara sah dari 84 dapil yang ada.

Sementara itu, Partai Nasdem berada di posisi 4 besar setelah sukses mengoleksi 69 (11,9 persen) kursi, selisih 1 kursi dengan mengantikan PKB yang merosot ke posisi 5 dengan perolehan 68 (11,72 persen) kursi.

Berikut daftar partai politik dan total perolehan kursi DPR RI 2024: 1. PDI-P 110 (18,97 persen) kursi, Golkar 102 (17,59 persen) kursi, Gerindra 86 (14,83 persen) kursi, Nasdem 69 (11,9 persen) kursi, PKB 68 (11,72 persen) kursi, PKS 53 (9,14 persen) kursi, PAN 48 (8,28 persen) kursi, Demokrat 44 (7,59 persen) kursi.

Angka ini merupakan hasil penghitungan terhadap total perolehan suara sah hasil rekapitulasi tingkat nasional KPU RI mengacu pada Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024. ● mei



FOTO: ANT

PEMERIKSAAN LANJUTAN ADHI PRAMONO

Tersangka kasus dugaan korupsi penerimaan gratifikasi dan TPPU terkait pengurusan barang ekspor impor di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Makassar Adhi Pramono (kiri) berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/3). KPK memeriksa mantan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar tersebut sebagai tersangka dalam kasus korupsi dengan nilai mencapai Rp28 miliar.

Kejari Denpasar Setor Rp4,8 Miliar ke Kas Negara dari Terpidana Korupsi

DENPASAR (IM) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar melaksanakan pemulihan kerugian negara dengan pembayaran uang pengganti sebesar Rp4,8 miliar dalam perkara tindak pidana korupsi parkir bandara, dengan terpidana bernama Chris Sridana.

Uang Rp4,8 miliar itu merupakan hasil lelang aset terpidana Mantan Direktur Utama PT Penata Sarana Bali, Chris Sridana dalam kasus korupsi pengelolaan parkir Bandara I Gusti Ngurah Rai Tahun 2008 hingga 2011.

Kepala Kejari Denpasar, Agus Setiadi men-

gatakan, uang itu disetorkan ke kas negara sebagai bentuk pendapatan negara bukan pajak.

"Sebelumnya telah dilakukan pemulihan keuangan negara sebesar Rp6,5 miliar pada 30 Juli 2018," ucapnya, Kamis (21/3).

Sebelumnya berdasarkan putusan Peninjauan Kembali 19 Juli 2021, terpidana Chris Sridana dijatuhkan pidana penjara selama 15 tahun dan pidana denda sebesar Rp1 miliar subsidi 3 bulan kurungan. Selain itu Chris juga dikenakan pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp19 miliar. ● mei

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



PROYEKSI KEBUTUHAN ASN SECARA NASIONAL

Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) berfoto bersama usai pelantikan di lingkungan kerja Pemerintah Kota Bogor, Plaza Balai Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (22/3). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan proyeksi kebutuhan ASN secara nasional pada tahun 2024 sebesar 2.302.543 yang terdiri dari 690.822 calon pegawai negeri sipil (CPNS), 1.605.694 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dan 6.027 usulan sekolah kedinasan dengan prioritas pada pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar yaitu tenaga guru dan tenaga kesehatan.

Capres Terpilih Prabowo Disambut Karpets Merah Saat Temui Surya Paloh

Nasdem menjadi parpol pertama di luar KIM, menyampaikan ucapan selamat kepada Prabowo dan Gibra. Kemudian PKS.

JAKARTA (IM) - Calon presiden (capres) pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 Prabowo Subianto menandai Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Jumat (22/3).

Prabowo tiba pukul 13.35 WIB didampingi jajaran petinggi Partai Gerindra, di antaranya Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, dan Wakil Ketua Umum Gerindra, Sugiono.

Sementara, Surya didampingi Sekjen Nasdem, Hermawati Taslim, Bendahara Umum Nasdem, Ahmad Sahroni, dan Ketua DPP Nasdem, Willy Aditya. Berdasarkan pantauan di lapangan, Prabowo tiba dengan mengenakan pakaian lengan panjang berwarna putih. Ia kemudian bersalaman dan berpelukan dengan Surya Paloh. Setelah berbincang sebentar, rombongan Prabowo

dan jajaran pengurtus Nasdem, memasuki Nasdem Tower.

Tak hanya itu, pertemuan itu pun nampak spesial karena Nasdem menggelar karpets merah untuk menyambut kedatangan rombongan capres terpilih. Sebelumnya, cawapres pemenang Pilpres 2024, Gibran Rakabuming Raka mengatakan bahwa pihaknya bakal merangkul semua pihak. Ia juga mengungkapkan bahwa Koalisi Indonesia Maju (KIM) tengah mendekati sejumlah parpol.

"Sudah ada ke arah sana (pendekatan), lebih dari satu partai," sebutnya.

Sementara itu, dalam Pilpres 2024 Nasdem merupakan bagian dalam Koalisi Perubahan bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ketiga parpol itu mengukung capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Nasdem menjadi parpol

pertama di luar KIM, yang memberikan selamat untuk Prabowo dan Gibran setelah pengumuman hasil suara resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu (20/3).

Selain Nasdem, partai lain yang memberikan ucapan selamat kepada Prabowo adalah PKS. Meski demikian, Ketua Fraksi PKS di DPR RI, Jazuli Juwaini, menyebutkan, tetap ada ruang bagi pihak yang tidak puas dengan hasil Pemilu 2024 untuk mengajukan keberatan di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ya, kita ucapkan selamat dalam tahap hitungan KPU dengan tetap ada ruang MK," kata Jazuli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/3).

Jazuli mengatakan, banyak pihak yang mempersoalkan kemenangan Prabowo-Gibran. Menurut dia, selama didasari oleh bukti yang kuat, keberatan itu bisa digugat di MK. Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai, peluang Partai Nasdem untuk bergabung dengan pemerintahan baru cukup besar. Hal ini terlihat dari sikap Nasdem yang menjadi partai politik (parpol) pertama yang menyatakan menerima hasil Pemilu 2024.

Suhartoyo, Saldi Isra, dan Arief Hidayat Pimpin 3 Panel Hakim Sengketa Pileg 2024

JAKARTA (IM) - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bakal membagi persidangan sengketa/perselisihan hasil pemilu (PHPU) legislatif 2024 ke dalam 3 panel hakim.

Hal ini guna mengantisipasi banyaknya sengketa yang masuk, mengingat jumlah daerah pemilihan (dapil) DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota mencapai ribuan dapil.

"(Sidang sengketa) pileg panel. Kita kan punya 9 hakim, nanti dibagi 3," kata Ketua MK Suhartoyo kepada wartawan, Jumat (23/3).

Mahkamah telah menyepakati masing-masing ketua

panel, yakni Suhartoyo sendiri, Wakil Ketua MK Saldi Isra, dan eks Ketua MK Arief Hidayat.

"(Yang memimpin) Prof Saldi, saya, dan Pak Arief," ucap Suhartoyo.

Pendaftaran gugatan sengketa/PHPU terbuka hingga 23 Maret 2024. Bagi peserta Pileg 2024, sesuai Pasal 474 UU Pemilu, batas waktunya selama 3x24 jam sejak penetapan suara diumumkan KPU RI pada Rabu (20/3) pukul 22.19 WIB melalui Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pilpres, Pileg DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota 2024.

Pendaftaran sengketa Pileg 2024 ke MK paling lambat 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB. Sementara itu, bagi pasangan capres-cawapres, sesuai Pasal 475 UU Pemilu, batas waktunya yakni 3 hari setelah penetapan suara diumumkan KPU RI.

MK akan lebih dulu menyalurkan sengketa Pilpres 2024. Mereka punya waktu paling lambat 14 hari kerja atau hingga 22 April sebelum tiba pada pembacaan putusan. Setelahnya, mereka memiliki 30 hari kerja untuk menyidangkan sengketa Pileg 2024, sehingga pembacaan putusan diprakirakan baru bisa dilakukan pada awal Juni 2024. ● mei



FOTO: ANT

KPK PERIKSA AHMAD SAHRONI

Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni berjalan ke luar ruangan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/3). Ahmad Sahroni memenuhi panggilan penyidik KPK sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

"Tim Amin (Anies-Muhaimin) satu persatu seperti ini mulai mundur teratur. Nasdem terlihat mulai melunak, ter-

utama melihat respons partai ini atas hasil keputusan KPU," ujar Adi kepada wartawan, Jumat (22/3). ● han

Hasto Sebut Ada Operasi Politik untuk Singkirkan Kader PDI-P yang Kritis

JAKARTA (IM) - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, ada operasi politik khusus untuk menyingkirkan kader-kader PDI-P yang selama ini dinilai kritis.

Hal itu ia sampaikan usai ditanya soal beberapa kader PDI-P yang kerap vokal menyuarakan kritikan pada pemerintah seperti Ribka Tjiptaning hingga Masintun Pasaribu terancam tidak lolos menjadi anggota DPR pada periode 2024-2029.

"Sehingga ada upaya-upaya operasi-operasi politik untuk menyingkirkan kader-kader PDI Perjuangan yang kritis," kata Hasto ditemui di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara Nomor 19, Jakarta Pusat, Kamis (21/3).

Hasto mengkhawatirkan, ke depan DPR akan diisi oleh politisi-politisi yang hanya tunduk pada pemerintah. Hal tersebut justru menjadi tanda bahaya bagi demokrasi Indonesia. Sebab itu, PDI-P akan terus memperjuangkan kader-kader yang kritis itu untuk tetap bisa melaju ke Senayan.

"Kami akan memberikan banyak sekali catatan. Kader-

kader PDI Perjuangan yang kritis itu kan ada operasi khusus. Maka ini akan terus diperjuangkan PDI Perjuangan," ungkapnya.

Selain itu, PDI-P tentu akan mencermati dan memberikan solidaritas terbesar kepada partai politik penguasa pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang juga tidak lolos parlemen karena perolehan suara kurang dari ambang batas 4 persen. Partai politik yang ia maksud adalah PPP, Perindo dan Hanura. Suara dari tiga parpol ini memang sengaja dikerdilkan oleh penguasa.

"PPP, Hanura, dan Perindo yang juga mengalami kerugian kerugian, yang suaranya dikecil-kecilkan karena mendukung Ganjar-Mahfud," ucapnya.

"PPP itu sahabat setia di dalam perjuangan sejak masa orde baru, yang dulu kami berdua PDI dan PPP dijadikan ornamen demokrasi. Maka ketika ada upaya untuk menghilangkan sejarah partai Kabah di dalam politik kita, ya kami akan memberikan solidaritas terbesar bagi eksistensi PPP, Hanura, dan Perindo," ujarnya. ● han

Pengusaha Asal Gunungkidul Dihukum 8 Bulan Penjara karena Ngeplang Pajak

JAKARTA (IM) - HR, pengusaha asal Gunungkidul, dihukum 8 penjara karena memanipulasi laporan pajak. Selain itu, HR dihukum membayar denda Rp191.846.760. Hakim juga dalam putusannya memerintahkan agar tetap ditahan di Rutan.

Sidang putusan ini dibacakan oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Wonosari, Kamis (21/3) kemarin.

Dalam putusannya, Majelis Hakim yang diketuai oleh Annisa Noviyati, S.H., M.H., menyatakan, RH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

"Terdakwa RH dijatuhi vonis hukuman pidana penjara selama 8 bulan dikurangi masa tahanan," tutur majelis hakim membacakan putusannya.

Apabila terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda.

Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Terdakwa kini tetap

ditahan di Rumah Tahanan LP Kelas 2 B Wonosari.

Terungkapnya kasus tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh RH berawal dari penyelidikan yang dilaksanakan oleh Tim Penyidik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJP DIY), Kepolisian Daerah (Polda) DIY, dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY, yang berkoordinasi dan sinergi yang baik antara Kanwil DJP DIY, Kepolisian Daerah (Polda) DIY, dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY, menyatakan, RH telah dinyatakan lengkap (P 21) dan telah dilimpahkan ke kejaksaan pada 21 Desember 2023 yang lalu.

Selain itu, sebagai jaminan untuk pemulihan kerugian pada pendapatan negara, tim penyidik Kanwil DJP DIY juga telah melakukan penyiapan aset milik terdakwa sebesar Rp13.384.000 Rp BD 05/BD 0501/2017. Sementara aset yang berhasil disita adalah 2 unit sepeda motor.

"Sesuai dengan putusan hakim, aset-aset milik terdakwa tersebut dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengurang pembayaran denda," ujar Kepala Bidang Penyelesaian, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil Ditjen Pajak DIY, Ramos Irawadi. ● mei